



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **(LAKIP) DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR 2024**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
Jl. Cempaka No. 2 Kota Pematangsiantar Telp. 0622 - 23766**

## **PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia dan ridho-Nya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar.

Dengan tersusunnya LAKIP 2024 ini diharapkan bisa terlihat suatu capaian kinerja dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar untuk Tahun Anggaran 2024, dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk tahun anggaran selanjutnya.

Pematangsiantar, Maret 2025  
**Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan  
Perdagangan Kota Pematangsiantar**



**HERBET ARUAN, S.Pd, MH**  
**Pembina Tk I**  
**NIP. 19710205 199305 1 001**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Penjelasan Umum Organisasi .....	3
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.3. Permasalahan Umum (Isu Strategis) .....	5
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	8
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	11
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	16
3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir .....	21
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional.....	24
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	25
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	26
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	27
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	30
3.2. Realisasi Anggaran.....	34
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1 Perjanjian Kinerja	
2 Indikator Kinerja Utama	
3 DII yang dianggap perlu	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Penjelasan Umum Organisasi**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kota Pematangsiantar. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan Perindustrian, dimana setiap tahunnya wajib membuat Laporan yang berisi Akuntabilitas dan kinerja sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

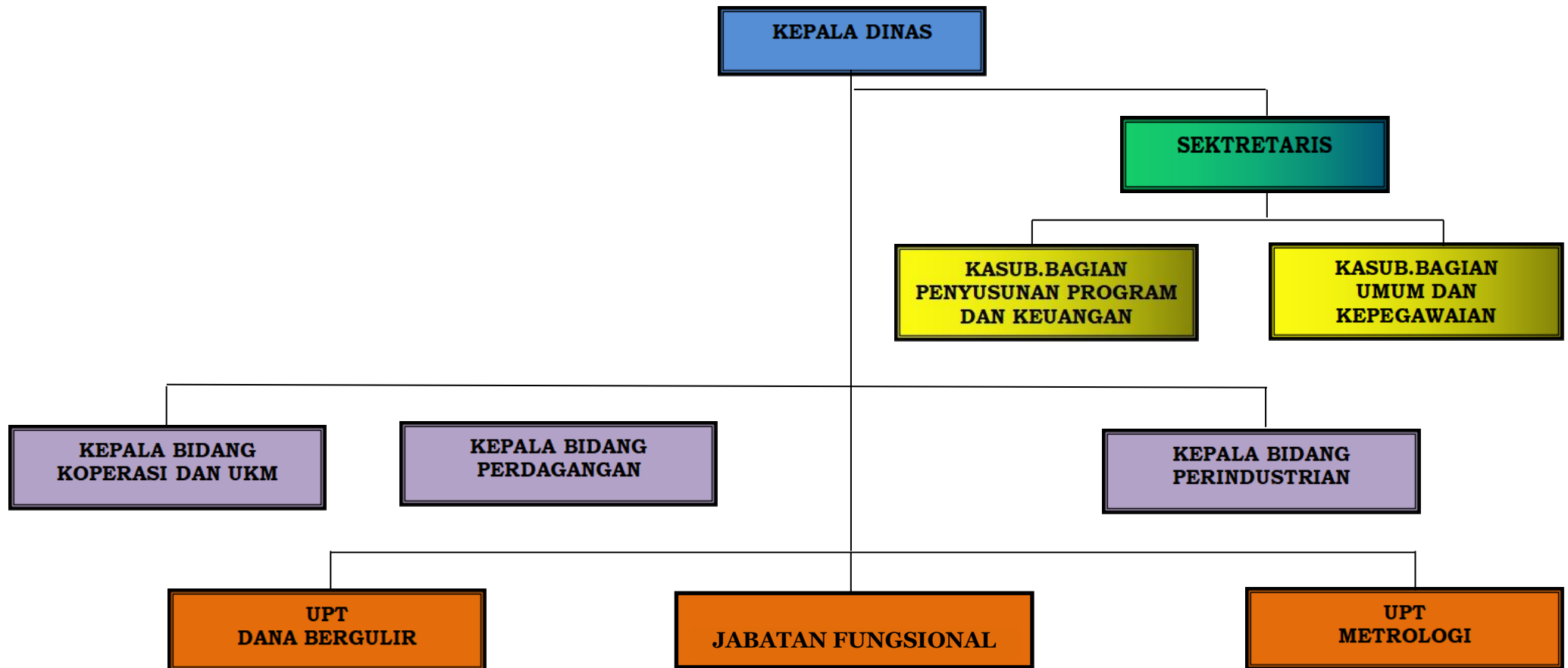
Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  - Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Perindustrian
- f. UPTD, dan
- g. Kelompok Fungsional.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menangani 3 Urusan antara lain Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Koperasi, dan Urusan Wajib yaitu Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian.

Dalam melaksanakan setiap urusan baik urusan koperasi, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh ASN yang menangani setiap urusan yang telah ditentukan oleh kepala OPD. Berikut jumlah ASN yang menangani setiap urusan

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR



Sumber: Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 061/1377/XII/WK-THN-2022

## **1.2. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kota Pematangsiantar. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar adalah:

### **a. Tugas Pokok**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan Perindustrian.

### **b. Fungsi**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 4) Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

## **1.3. Permasalahan Umum (Isu Strategis)**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara

kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Rendahnya daya saing produk Usaha Mikro;
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kualitas produk Usaha Mikro;
3. Kelembagaan koperasi belum sepenuhnya mendukung gerak pengembangan usaha;
4. Mendesaknya penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian;
5. Belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tataniaga yang efektif dan efisien, baik dalam pemasaran hasil produksi Usaha Mikro;
6. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
7. Kurangnya pengembangan industri pengolahan;
8. Kurangnya perencanaan dan pembangunan industri;
9. Kurang tersedianya sarana dan prasarana produksi;
10. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan izin usaha industri;
11. Kurang maksimalnya sinkronisasi sistem industri;
12. Kurangnya kualitas produk sesuai dengan standar ekspor;
13. Kurang optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen;
14. Kurangnya kompetensi pelaku usaha produksi produk potensial daerah;
15. Kurang maksimalnya promosi pemanfaatan produk dalam negeri;
16. Kurangnya keterjangkauan harga pangan;
17. Kurang terkendalinya stabilisasi harga pangan;
18. Kurangnya kualitas sarana distribusi perdagangan;
19. Kurangnya pemeliharaan dan revitalisasi Pasar Rakyat.
20. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang alat UTP.

Sedangkan untuk Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan, adapun isu-isu strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM dan IKM yang adaptif terhadap perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa dalam maupun luar negeri.
2. Mendesaknya penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian.
3. Penguatan UMKM dan implementasi teknologi informasi dalam pengembangan UMKM.
4. Pengembangan Industri yang Berdaya Saing.
5. Pengembangan Usaha Perdagangan.
6. Pengembangan dan penataan pasar.
7. Penerapan Metrologi yang tepat



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2024.

Penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar didukung dengan pembiayaan PAPBD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar untuk total belanja sebesar Rp. **8.377.227.562.00,-** (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari jumlah anggaran tersebut terdapat anggaran kegiatan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. Rp1.182.135.016,- (Satu Milyar seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam belas rupiah).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas dibawah ini:

**TABEL 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas	55,00%
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya	50,00%
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan	75%
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	4,00%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1%

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	5.604.470.217,00	APBD
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	41.519.025,00	APBD
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	19.214.360,00	APBD
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.705,669,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	22.062.318,00	APBD
6. Program Pengembangan UMKM	146.791.636,00	APBD
7. Program Standarisasi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Konsumen	116.651.760,00	APBD
8. Program Standarisasi dan	29.320.346,00	APBD

<b>Perlindungan konsumen</b>		
<b>9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.</b>	<b>2.374.492.231,00</b>	<b>APBD</b>
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 8.377.227.562,00</b>	

*Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tahun 2024*

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Nomor 000.7.2.6/1111/DKUP/VIII/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor 900/1486/DKUP/X/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**TAHUN 2022-2027**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
2.	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	$\frac{\text{Jumlah UMKM Binaan yang meningkat omsetnya}}{\text{Jumlah UMKM Binaan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
3.	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola}}{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ada}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> <li>OSS</li> </ul>
4.	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> <li>SIINAS</li> </ul>

**Sumber: Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2027**

Sasaran strategis yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027, sasaran pada misi kedua dan kelima **“Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah”**

Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau Tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Pematangsiantar dalam rangka mewujudkan Pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan Perindustrian yang selaras dengan RPJMD Kota Pematangsiantar.

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang Tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui

Pemerintah Kota Pematangsiantar selaku pengemban Amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2027, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (Lima) tahunan yang direncanakan dalam RENSTRA. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Renstra.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LAKIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik

2	76% ≤ 90%	Baik
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

**Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017**

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam laporan ini Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2022-2027 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator dengan rincian berikut :

**Tabel 3.2**  
**Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Predikat
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	1 indikator	Sangat Baik
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	1 indikator	Sangat Baik
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	1 indikator	Sangat Baik
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	1 indikator	Sangat Baik
5	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Baik




6	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		Jumlah inovasi perangkat daerah	

Sumber: Hasil Evaluasi IKU Tahun 2024

### 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian indikator kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	55,00	58,92	103,92
Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	50,00	49,86	99,72
Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	75,00	75,00	100,00
Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)	4,00	4,00	100,00
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	B
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,55	110,68
	Jumlah inovasi perangkat daerah	1	1	 <p>Penandatanganan dokumen kesepakatan dengan Hotel Grand Zury</p>

Sumber: Hasil Evaluasi IKU Tahun 2024

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kota Pematangsiantar tahun 2024 adalah sebesar 102,86% dengan penilaian kinerja sangat baik.

Secara umum Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja 2024. Hal tersebut dapat dilihat dalam analisis capaian dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

**SASARAN 1: Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik**

**Indikator : Persentase koperasi yang berkualitas (%)**

Persentase koperasi berkualitas terealisasi sebesar 58,92%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 55%, sehingga persentase capaiannya sebesar 103,92%, dan dikategorikan **Sangat Baik**.

Capaian kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa ada perubahan formulasi hitungan indikator kinerja kunci (IKK) berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 terkait indikator kinerja dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Oleh karena itu yang semula formulasi hitungan pada indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas adalah Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi jumlah seluruh koperasi menjadi Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi jumlah seluruh koperasi yang aktif. Sehingga capaian kinerja melebihi target.

Tahun 2024 ada sebanyak 66 koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset dari jumlah total 267 koperasi sedangkan jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 sebanyak 112 koperasi.

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi Koperasi yang ada di Kota Pematangsiantar serta Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
  - a) Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi;
  - b) Minimnya diversifikasi usaha koperasi;
  - c) Masih adanya KSP/USP yang belum dikelola secara baik dan profesional;

- d) Banyaknya koperasi yang sudah berbadan hukum namun tidak aktif.
2. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
- a) Dilaksanakan pelatihan maupun pendampingan terhadap pelaku usaha perkoperasian secara kontinyu dan simultan yang bersifat pengembangan kualitas SDM kepada pengelola/manager koperasi maupun pelaku UMKM;
  - b) Mendorong KSU untuk melaksanakan diversifikasi usaha koperasi selain usaha simpan pinjam sebagai penguatan manajemen usaha koperasi;
  - c) Memberikan pelatihan maupun pendampingan penguatan kelembagaan koperasi secara kontinyu, baik langsung maupun tidak langsung bagi pengurus KSP/USP agar koperasi yang dikelola dapat dijalankan secara profesional dan akuntabel;
  - d) Melakukan kerjasama/fasilitasi permodalan baik dengan Perbankan maupun lembaga keuangan yang lain;

**SASARAN 2 : Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing**

**Indikator : Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)**

Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya terealisasi sebesar 49,86% sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga persentase capaiannya sebesar 99,72%, dan dikategorikan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka meningkatkan persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Pada Tahun 2024 jumlah usaha mikro binaan sesuai dengan SK Nomor: 019/518/DKUP/VI/2024 ada sebanyak 187 usaha mikro. Mengingat banyak usaha mikro yang ada di Kota Pematangsiantar yaitu sebanyak 21.574 usaha mikro, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar melakukan pemetaan terhadap usaha mikro binaan sebanyak 187 usaha mikro. Dimana usaha mikro binaan tersebut mendapat pendampingan, fasilitasi, pengembangan dan peningkatan volume usaha melalui pelatihan, pemberian bantuan sarana prasarana, penguatan

kelembagaan, kemitraan dan fasilitasi pemasaran untuk meningkatkan omset usaha mikro.

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi usaha mikro yang ada di Kota Pematangsiantar serta Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Permasalahan yang dihadapi antara lain:
  - a) Terbatasnya akses permodalan bagi usaha mikro
  - b) Rendahnya pengetahuan usaha mikro tentang manajemen keuangan usaha yang baik
  - c) Kemasan produk usaha mikro yang kurang berdaya saing
  - d) Standarisasi dan sertifikasi produk masih minim
  - e) Rendahnya kemitraan dalam pengembangan volume usaha
  - f) Masih banyaknya produk usaha mikro belum masuk e-purchasing
2. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
  - a) Fasilitasi permodalan melalui pinjaman dana bergulir
  - b) Fasilitasi pengembangan desain kemasan produk melalui pendampingan di rumah kemasan
  - c) Pendampingan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk yang bekerjasama dengan BUMN, perbankan dan BI
  - d) Pendampingan usaha mikro agar masuk ke e-purchasing seperti shopee, bli bli, Tokopedia, e-catalog local dan Mbizz.
  - e) Pelatihan terhadap pelaku usaha mikro seperti pelatihan digital marketing.

### **SASARAN 3 : Meningkatkan kinerja perdagangan daerah**

**Indikator : Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)**

Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan terealisasi sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga persentase capaiannya sebesar 100%, dan dikategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka meningkatkan persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

#### Permasalahan dan Solusi:

- a) Sarana distribusi perdagangan belum optimal dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Banyaknya pasar tradisional yaitu ada sebanyak 4 pasar yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Diharapkan dengan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan dapat segera mengoperasikan pasar tradisional yang ada di kecamatan;
- b) Belum terdata dengan baik sarana distribusi perdagangan seperti toko dan swalayan, diharapkan dengan melakukan pendataan secara rutin sehingga meta data Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan bisa terupdate setiap tahunnya;
- c) Pelaksanaan tera/tera ulang tidak dapat berjalan optimal di semua pasar tradisional yang ada di kota pematangsiantar. Hal ini dikarenakan minimnya tenaga penara. Tenaga penara yang ada hanya 2 orang dengan potensi alat UTTP di Kota Pematangsiantar yang sebanyak 4853 unit. Namun dengan itu tetap diusahakan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal walau dengan tenaga yang terbatas.

#### **SASARAN 4 : Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah** **Indikator : Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)**

Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah terealisasi sebesar 4% sesuai dengan target yang ditetapkan 4 % sehingga persentase capaiannya sebesar 100% dan dikategori sangat baik. Adapun pertumbuhan industry dari tahun 2023 sebanyak 1046 dan tahun 2024 sebanyak 1465. Dari data tersebut ada pertumbuhan sebanyak 419 industri skala kecil.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya kondisi perekonomian mengalami kemerosotan akibat pandemi covid-19. Selain itu, disrupsi di dunia industry akibat perkembangan teknologi menyebabkan persaingan usaha semakin ketat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan baik pada produk industri yang dihasilkan maupun pelaku usaha itu sendiri agar mampu meningkatkan ketahanan dalam menghadapi persaingan global.

### 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	55,00	58,92	17,33	35,72	16,00	36,04
2	Persentase usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya (%)	50,00	49,86	40,00	40,00	3,01	3,02
3	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	75,00	75,00	67,00	67,00	65,00	54,72
4	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)	4,00	4,00	27,00	43,85	65	54,72
5	Nilai AKIP perangkat daerah	B	B	-	-	-	-
6	Nilai indeks kepuasan masyarakat	80	88,55	-	-	-	-
	Jumlah inovasi perangkat daerah	1	1	-	-	-	-

*Sumber: Lakip Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022 dan 2023*

Pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah menetapkan target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Oleh karena itu target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menampilkan target tahun 2022, 2023 dan 2024.

#### **Persentase koperasi yang berkualitas (%)**

Persentase koperasi berkualitas terealisasi sebesar 58,92%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 55,00%, sehingga persentase capaiannya sebesar 103,92%, dan dikategorikan Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 maka ada peningkatan hasil capaian kinerja di tahun 2024 walaupun hasil yang diperoleh sesungguhnya tidak menunjukkan peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas dari hasil pemeriksaan Kesehatan koperasi tahun 2024. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah koperasi yang berkualitas pada tahun 2023 ada sebanyak 40 koperasi dan pada tahun 2024 ada sebanyak 66 koperasi. Hal ini terjadi karena jumlah seluruh koperasi mengalami penurunan jumlah seluruh koperasi tahun 2024 ada sebanyak 375 koperasi dengan kondisi 112 koperasi aktif dan 155 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2024 ada sebanyak 112

koperasi yang dibubarkan dari koperasi yang tidak aktif dan 1 koperasi yang baru. Sehingga pada tahun 2024 ada sebanyak 112 koperasi aktif dan 155 koperasi tidak aktif.

Beberapa yang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas koperasi adalah:

1. Banyaknya Koperasi yang berbadan hukum tapi tidak aktif
2. Masih adanya koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT
3. Lemahnya pengetahuan SDM pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan
4. Tidak adanya koperasi yang bergerak dalam sektor rill, jasa dan sektor lainnya namun kebanyakan bergerak dalam bidang simpan pinjam.

#### **Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)**

Bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dari 40,00% (2023) dengan usaha mikro binaan sebanyak 75 usaha mikro menjadi 49,86% (2024) dengan usaha mikro binaan sebanyak 187 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka meningkatkan persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.

Pada tahun 2024 ditetapkan usaha mikro binaan sebanyak 187 usaha mikro sesuai dengan SK Kepala Dinas Nomor: 019/518/1663/VI-2024. Surat Keputusan Kepala dinas ini bertujuan agar Dinas Koperasi lebih fokus dalam pengawasan dan peningkatan produktivitas usaha mikro dalam meningkatkan omsetnya. Kondisi tahun 2024 ada sebanyak 21.574 usaha mikro yang ada di kota pematangsiantar. Melihat kondisi tersebut dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan jumlah SDM yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan maka usaha mikro ditetapkan menjadi usaha mikro binaan.

#### **Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)**

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024, maka realisasi persentase pengolahan sarana distribusi perdagangan tahun 2024

mengalami kenaikan. Realisasi tahun 2023 sebesar 54,72 % atau ada sebanyak 101 sarana distribusi perdagangan (pasar tradisional, gudang, toko dan swalayan) yang dilakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan dibanding tahun 2024 sebesar 75% atau sebanyak 118 sarana distribusi perdagangan telah dikelola dengan baik.

Ada pun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di kota pematangsiantar adalah antara lain:

1. Pengelolaan pasar melalui kegiatan tera/ tera ulang di pasar horas;
2. Pembinaan terhadap pengelola pasar dengan cara koordinasi agar pelaku usaha atau pedagang di pasar tradisional dapat ditata dengan baik;
3. Pendataan gudang dan pemeriksaan atas izin usaha yang diterbitkan;
4. Pendataan toko dan swalayan serta pemeriksaan izin usaha dan mutu barang yang dipasarkan;
5. Pendataan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting lainnya untuk menjaga stabilisasi harga.

### **Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)**

Persentase pertumbuhan industri tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah industri kecil dan menengah. Dimana pada tahun 2023 sebanyak 1046 dan tahun 2024 sebanyak 1465. Dari data tersebut ada pertumbuhan sebanyak 419 industri skala kecil atau sebesar 28%. Pertumbuhan industri ini merupakan bentuk ketahanan IKM dalam menghadapi persaingan usaha dan dampak dari kemerosotan ekonomi akibat covid 19. Pelaku usaha industri kecil yang sempat tutup akibat penurunan ekonomi secara global akhirnya dapat memulai lagi usaha nya. Selain itu adanya pertumbuhan industri kecil baru yang sangat berperan dalam gerak perekonomian di kota pematangsiantar.

### **3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional**

**Tabel 3.5**



**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Kinerja Renstra**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	55,00	58,92	20,00	21,33
2	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	50,00	49,86	50,00	60,00
3	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	75,00	75,00	84,00	92,00
4	Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah (%)	4,00	4,00	32,00	34,00
5	Nilai AKIP perangkat daerah	B	B	-	-
6	Nilai indeks kepuasan masyarakat	80	88,55	-	-
	Jumlah inovasi perangkat daerah	1	1	-	-

*Sumber: Metadata Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2022-2027*

Tahun 2024 merupakan tahun Ketiga dalam periode pembangunan jangka menengah 2022-2027. Secara garis besar capaian realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027 menunjukkan capaian kinerja yang baik. Tiga indikator yang telah mencapai 100% pencapaian kinerjanya dengan kategori sangat baik dan satu indikator yang tidak mencapai target namun mencapai rata-rata 102,86% dengan kategori sangat baik.

#### **3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tidak dapat dibandingkan secara mutlak dengan indikator kinerja nasional, provinsi maupun organisasi sekelas lainnya. Mengingat penentuan indikator kinerja merupakan kewenangan masing-masing organisasi. Meski demikian, indikator kinerja antar organisasi dapat saling terkait.

Pada urusan koperasi dan UKM, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar hampir mirip. Indikator kinerja urusan koperasi dan UKM Provsu adalah Meningkatnya jumlah koperasi aktif sedangkan

pada dinas koperasi, ukm dan perdagangan kota pematangsiantar memiliki indikator persentase koperasi yang berkualitas dengan formulasi hitungan jumlah koperasi yang sehat dibagi jumlah koperasi aktif. Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM memiliki kesamaan indikator kinerja yaitu persentase koperasi yang berkualitas. Dimana target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan adalah 55% dengan realisasi 58,92%.

Pada urusan Perdagangan, indikator kinerja dinas koperasi, ukm dan perdagangan kota pematangsiantar yaitu persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan target 75% dengan capaian kinerja 100% mendukung indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara yakni persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB angka dalam harga konstan (ADHK).

Target indikator persentase laju pertumbuhan sektor industry terhadap PDRB angka dalam harga konstan (ADHK) sebesar 0,84%.

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini  
dengan Standar Nasional**

NO	INDIKATOR KINERJA	Dinas KOPUKMDAG		Kementerian terkait		Dinas Provinsi terkait		KET
		TARGE T 2024	REALIS ASI 2024	TARGE T 2024	REALI SASI 2024	TARGE T 2024	REALI SASI 2024	
1	<b>Persentase koperasi yang berkualitas (%)</b>	55,00%	58,92%	-	-	-	-	Lakip Kemenkopukm
	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi			-	-	-	-	Indikator kinerja tidak sama namun saling mendukung
2	<b>Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)</b>	50,00%	49,86%	-	-	-	-	Indikator kinerja tidak sama namun saling mendukung
	Persentase pertumbuhan wirausaha			-	-	-	-	
	Pertambahan wirausaha baru			-	-	-	-	
3	<b>Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)</b>	75%	75,00%	-	-	-	-	Indikator kinerja tidak sama namun saling mendukung
	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina			-	-	-	-	

4	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	4,00%	4,00%	-	-		-	Indikator kinerja tidak sama namun saling mendukung
	Wirausaha industri kecil yang tumbuh			-	-		-	
5	Nilai AKIP perangkat daerah	B	B	-	-	-	-	
6	Nilai indeks kepuasan masyarakat	80	88,55	-	-	-	-	
	Jumlah inovasi perangkat daerah	1	1	-	-	-	-	

### 3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2024 ini mencapai rata-rata 102,86% meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal antara lain:

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
- Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD dalam mendukung pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
- Capaian kinerja Persentase koperasi yang berkualitas melebihi target kinerja dikarenakan perubahan pada formulasi perhitungan yang semula Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi jumlah seluruh koperasi berubah menjadi Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi jumlah koperasi aktif.
- Capaian kinerja Persentase pertumbuhan industri kecil menengah melebihi target kinerja dikarenakan pada saat pembuatan target kinerja sebelumnya

banyak IKM yang terdampak Covid-19 sehingga target rendah sesuai dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Namun kondisi covid-19 yang telah mereda membuat IKM bangkit kembali.

Selain penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran antara lain:

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Seperti halnya kurangnya tenaga perencana di bagian program keuangan, kurangnya tenaga fungsional penera dan tenaga lapangan sebagai pendata.
- b. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di OPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- c. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang targetkan.

#### **3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efesiensi sumber daya dan sumber daya manusia. Presentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Presentasi efisiensi biaya} = 100\% - \left\{ \frac{\text{Realiasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 8.216.794.945,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 8.377.227.562,00. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,1%. Persentase ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber

daya pada beberapa kegiatan.

**Tabel 3.6**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	103,92	83.439.054	56.940.127	68,24	31,76
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	99,86	168.853.954	155.121.520	91,86	9,08
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	100,00	145.972.106	142.547.372	97,67	2,34
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	100,00	2.374.492.321	2.324.725.633	97,90	2,1
5	Nilai AKIP perangkat daerah	B	B	-	-	-	-
6	Nilai indeks kepuasan masyarakat	80	88,55	-	-	-	-
	Jumlah inovasi perangkat daerah	1	1	-	-	-	-

Sumber: DPPA, Hasil Evaluasi Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja koperasi yang berkualitas terlihat sangat efisiensi dimana capaian kinerja jauh lebih besar dibanding anggaran yang digunakan. Capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 103,53% dengan realisasi anggaran sebesar 94,90%. Capaian Kinerja tersebut besar dikarenakan banyaknya koperasi tidak aktif di kota Pematangsiantar. Untuk indikator yang lain sangat efisien dalam mendukung sasaran yang ada.

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi	%Realisasi
-------------------	---------	------	-----------	------------

PROGRAM UTAMA				
Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	41.519.025	35.612.527,00	85,77%
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	19.214.360	0	0%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	19.214.360	1.378.069	93,93%
Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	146.791.636	133.723.590,00	91,10%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	22.062.318	21.397.930	96,98
Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	116.651.760	114.264.000,00	97,95%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	29.320.346	28.283.372,00	96,46%
Meningkatkan pertumbuhan Industry kecil menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.374.492.231	2.324.725.633,00	97,90%
PROGRAM PENDUKUNG				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.444.037.600,00	5.118.668.418,00	94,02%

Sumber: DPPA, LRA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2024

Pada tabel 3.7 menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Analisis efisiensi dilakukan pada indikator sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target atau melampaui target kinerja.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Efisiensi**

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya pengelolaan koperasi yang lebih baik	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	103,92%	85,77%	14,23%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			83,44%	16,56%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			96,43%	3,57%
2	Terwujudnya UMKM yang mandiri dan berdaya saing	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya (%)	99,86%	91,10%	8,9%
	Meningkatnya usaha mikro binaan dari usaha menjadi usaha kecil				
3	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	100,00%	97,95%	2,05%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			97,95%	2,05%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)		96,46%	3,54%
4	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah		100,00%	97,90%	2,1%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			97,90%	2,1%

Sumber: DPPA, LRA, PK kepala OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2024

### 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 9 Program dan 13 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini:

**Tabel Capaian Program dan Indikator Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2024**

NO	Nama Pogram	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Keterangan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	<b>Persentase koperasi yang aktif dan sehat</b>	55	58,92	103,92	41.519.025	35.612.527,00	85,77%	Persentase koperasi aktif meningkat menjadi 58,92% dari target 55% sehingga pesentase koperasi berkualitas juga meningkat
	Progran penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/USP yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Persentase Meningkatnya Jumlah KSP/USP koperasi yang sehat	14,28	-	-	-	-	-	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelmbagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Persentase Peningkatan volume usaha koperasi	2	76	86	22.705.669	21.327.600	93,93%	Persentase peningkatan volume usaha koperasi meningkat menjadi 1,79% dari target 1,5% sehingga persentase koperasi berkualitas juga meningkat



2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Persentase jumlah mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	3	16	6,25	22.062.318	21.397.930	96,98	Persentase usaha mikro yang mengikuti pelatihan meningkat menjadi 0,80% dari target 0,42 % sehingga persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya juga meningkat.
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro Binaan yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Meningkatnya usaha mikro binaan yang menjadi wira usaha	50	49,86	99,86	146.791.636	133.723.590	91,10%	
3	PROGRAM STABILITAS HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	Jumlah dokumen harga komoditas antar waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%	116.651.760	114.264.000	97,95%	Tersedianya dokumen harga komoditas antar waktu sebanyak 12 dokumen sehingga pengelolaan sarana distribusi perdagangan juga meningkat
	PROGRAM STANDARISASI DAN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	Pelaksanaan Metrologi Legal,	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat	Presentase alat ukur, takar, timbang dan	77	74,47	96,71	29.320.346	28.283.372	96,46%	persentase jumlah UTTP yang bertanda

	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Ulang, dan Pengawasan	Berupa Tera, Tera Ulang	Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera, tera Ulang	perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah							tera sah meningkat menjadi 74,61% dari target 70,15% sehingga persentase pengolahan distribusi perdagangan juga meningkat
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Persentase pertumbuhan industri aktif (industri skala kecil)	4	4	100%	2.374.492.231	2.324.725.633	97,90	Persentase pertumbuhan industri aktif (industri skala kecil) meningkat menjadi 28,00% dari target 20% sehingga persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah juga meningkat.
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	Persentase indikator kinerja yang terealisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	B	B	B	5.604.470.217	5.945.298.098	84,0	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah				449.687.933	428.170.615	95,21	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					160.432.617	152.483.148	95,04	

				Pemerintah Daerah								
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					424.835.200,00	400.002.836,00	94,15	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					97.626.133	66.064.702	67,67	

Sumber: Renstra, PK Kepala OPD, DPPA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar 2024

## **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan;**

### **Kegiatan:**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

### **Realisasi Program dan Kegiatan:**

- a. Tersedianya dana untuk pembayaran biaya surat menyurat, alat tulis kantor, penggunaan internet, air dan listrik selama setahun;
- b. Tersedianya dana untuk penggandaan dan penjilidan selama setahun;
- c. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk perawatan kantor selama 1 tahun;
- d. Tersedianya biaya pemeliharaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- e. Tersedianya dana untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai pelaksanaan tugas di dalam dan luar daerah;
- f. Tersedianya dana untuk jasa pemeliharaan kendaraan operasional;

## **2) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

### **Kegiatan:**

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang;
- b. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal;

### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Alat metrologi ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan lainnya harus memenuhi standar yang ada;
- b. Masyarakat dan pelaku usaha mengetahui aturan tentang kemetrologian legal sesuai aturan yang berlaku;

### **3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

#### **Kegiatan:**

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota

#### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 112 Koperasi mendapat fasilitasi pemeriksaan kesehatan koperasi

### **4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

#### **Kegiatan:**

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

#### **Realisasi Program dan kegiatan :**

Terdapat 89 koperasi yang sehat dan berkualitas.

### **5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

#### **Kegiatan:**

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota.

#### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 9 UMKM mendapatkan bantuan modal usaha berupa pinjaman dana bergulir

### **6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

#### **Kegiatan:**

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

#### **Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Terdapat 60 UMKM yang diberikan dukungan Fasilitasi Pelatihan.

**7) Program Stabilitas Harga Dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

**Kegiatan:**

- a. Pengendalian Harga, dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kab/ Kota

**Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Harga sembako dan barang penting lainnya yang dijual di pasar adalah harga yang wajar karena berada di dalam pengawasan;
- b. Terkendalinya gejolak harga di masyarakat menjelang hari raya idul fitri dan natal;
- c. Peredaran bahan pangan dan harga sembako terkendali.

**8) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

**Kegiatan:**

- a. Penyusunan, Penerapan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota

**Realisasi program dan kegiatan:**

- a. 78 Mesin pelinting rokok yang diawasi penggunaan dan kepemilikan registrasi mesin pelinting
- b. Hibah uang kepada Dekranasda

**9) Program Pengembangan UMKM**

**Kegiatan:**

Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

**Realisasi program dan kegiatan:**

- a. Terdapat 187 Usaha Mikro Binaan yang menjadi Wira Usaha

**3.2. REALISASI ANGGARAN**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2024, anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 8.377.227.562,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 7.798.003.070.- atau 94,90% terdapat silva Rp. 418.791.875,- atau 9,96%.

Realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar T.A. 2024 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

**TABEL 3.9**  
**REALISASI DAN KEGIATAN**  
**PADA SKPD DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Pergeseran	Realisasi	Sisa	%
1			2	4	5	6	7
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.696.330.608	5.330.730.065	365.600.543	93,58
2,17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.696.330.608	5.330.730.065	365.600.543	93,58
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	5.696.330.608	5.330.730.065	365.600.543	93,58
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.444.037.600	5.118.668.418,00	325.369.182	94,02
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.251.114	47.235.200,00	5.015.914	90,40
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.069.520	16.453.000,00	1.616.520	91,05
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.250.728	15.603.000,00	1.647.728	90,45
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.930.866	15.179.200,00	1.751.666	89,65
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.419.637.220	4.177.195.065,00	242.442.155	94,51
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.409.805.721	4.167.692.065,00	242.113.656	94,51
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.831.499	9.503.000,00	328.499	96,66
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.687.933	428.170.615,00	21.517.318	95,22
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.472.229	9.123.600,00	348.629	96,32
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.203.040	126.730.797,00	6.472.243	95,14
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.780.168	18.323.100,00	457.068	97,57
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.477.900	7.912.500,00	5.565.400	58,71
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.047.996	48.665.815,00	2.382.181	95,33



2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.706.600	217.414.803,00	6.291.797	97,19
2,17	2.17.3.30.3.31.03.000	2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.432.617	152.483.148,00	7.949.469	95,04
2,17	2.17.3.30.3.31.03.000	2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.432.617	152.483.148,00	7.949.469	95,04
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.835.200	400.002.836,00	24.832.364	94,15
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.925.200	6.697.900,00	227.300	96,72
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.220.000	47.987.936,00	17.232.064	73,58
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.690.000	345.317.000,00	7.373.000	97,91
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.626.133	66.064.702,00	31.561.431	67,67
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.640.000	43.192.702,00	30.447.298	58,65
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.986.133	22.872.000,00	1.114.133	95,36
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2,17,03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	41.519.025	35.612.527,00	5.906.498	85,77
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	41.519.025	35.612.527,00	5.906.498	85,77
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	41.519.025	35.612.527,00	5.906.498	85,77
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2,17,04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	19.214.360	0,00	19.214.360	0,00
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.214.360	0,00	19.214.360	0,00
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.214.360	0,00	19.214.360	0,00
<b>2,17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	16.473.684	15.885.225	588.459	96,43%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.473.684	15.885.225	588.459	96,43%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.473.684	15.885.225	588.459	96,43%
2,17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2,17,07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	22.062.318	21.397.930,00	664.388	96,99

2.17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	22.062.318	21.397.930,00	664.388	96,99
2.17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	22.062.318	21.397.930,00	664.388	96,99
2.17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2,17,08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	146.791.636	133.723.590,00	13.068.046	91,10
2.17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	146.791.636	133.723.590,00	13.068.046	91,10
2.17	2.17.3.30.3.31.03.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	146.791.636	133.723.590,00	13.068.046	91,10
<b>3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	2.343.034.341	1.784.567.751	558.466.590	76,16%
<b>3,3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	473.387.171	423.822.261	49.564.910	89,53%
<b>3,3</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>		<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR</b>	473.387.171	423.822.261	49.564.910	89,53%
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	116.651.760	114.264.000,00	2.387.760	97,95
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	116.651.760	114.264.000,00	2.387.760	97,95
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.363.908	29.565.000,00	798.908	97,37
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	86.287.852	84.699.000,00	1.588.852	98,16
<b>3,3</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	29.320.346	28.283.372,00	1.036.974	96,46
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	29.320.346	28.283.372,00	1.036.974	96,46
3,3	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	29.320.346	28.283.372,00	1.036.974	96,46
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.374.492.231	2.324.725.633	49.766.598	97,90
3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	2.374.492.231	2.324.725.633	49.766.598	97,90
3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000	3,31,02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	2.374.492.231	2.324.725.633,00	49.766.598	97,90
3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.374.492.231	2.324.725.633,00	49.766.598	97,90
3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	206.334.994	196.397.460,00	9.937.534	95,18
3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	52.683.177	46.586.149,00	6.097.028	88,43

3.31	2.17.3.30.3.31.03.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.115.474.060	2.081.742.024,00	33.732.036	98,41
<b>Jumlah</b>				8.216.794.945	7.798.003.070	<b>418.791.875</b>	<b>94,90%</b>

*Sumber: Data Realisasi Anggaran Diskoperindag Kota Pematangsiantar 2024*

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing – masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2022–2027, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri 6 (enam) sasaran. Secara umum, pencapaian 6 (enam) sasaran dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik sebanyak 5 (lima) indikator kinerja sasaran;
2. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori Baik sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran;

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara Target dan realisasi dari 5 (lima) sasaran, yang didukung oleh 13 kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut:

1. Sejumlah 2 (dua) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah diatas 90% dari rencana anggaran.
2. Sejumlah 2 (dua) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah di bawah 90% dari rencana anggaran.

Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak teralisasi secara keuangan karena ada beberapa belanja modal yang tidak terealisasi, kondisi harga barang mengalami fluktuasi harga yang tinggi serta barangnya tidak TKDN.

## 4.2 Rekomendasi dan Saran

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan melakukan koordinasi yang baik dengan instansi maupun lembaga yang terkait mengenai prosedur dan ketentuan yang ada demi kelancaran proses administrasi dan realisasi keuangan.
2. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perkoperasian, Pemberdayaan UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pematangsiantar.
3. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perkoperasian, Pemberdayaan UKM, Perindustrian dan Perdagangan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Pematangsiantar, Maret 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan Kota Pematangsiantar



**HERBET ARUAN, S.Pd, MH**  
Nip. 19710215 199305 1 001